

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Bali adalah salah satu Provinsi yang ada di Indonesia. Bali memiliki potensi dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia serta mampu mengembangkan usaha-usaha kecil seperti UMKM untuk perkembangan ekonomi Nasional. UMKM memiliki peranan dalam ekonomi baik secara nasional maupun daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara baik. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tergolong produktif dan mampu dalam penyerapan tenaga kerja, baik dalam skala usaha perorangan maupun badan usaha (Balipost.com, 2020). Kabupaten Buleleng menjadi salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng mempunyai berbagai macam destinasi wisata dan dunia usaha yang terus mengalami perkembangan, seperti halnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tingkat perekonomian yang ada di Kabupaten Buleleng terus melakukan pengembangan guna memacu peningkatan perekonomian pada masyarakatnya. Upaya dalam membangun ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan untuk memperkuat pondasi pembangunan Kabupaten Buleleng di segala bidang (Buku Dinas Statistik Dunia Usaha Daerah, 2019). Salah satu usaha yang umum mengalami perkembangan di pedesaan Kabupaten Buleleng yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha ini banyak dikembangkan di pedesaan karena melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) yang mencukupi dan menggunakan modal yang terbilang kecil. Berdasarkan informasi dari Badan

Statistik Kabupaten Buleleng (2020) memiliki 9 Kecamatan dan 14 desa yang tersebar. Salah satu dari 14 desa tersebar yakni ada Desa Gitgit yang terkenal dengan wisata air terjunnya. Mata pencaharian warga di Desa Gitgit mayoritas sebagai petani untuk menunjang perkembangan ekonomi di Desa Gitgit.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Dikarenakan UMKM menjadi penopang sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, lebih dari itu perkembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat perubahan secara struktural (Zuhri, 2013). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didirikan secara seorang, perorangan, atau secara anggota yang bergerak dibidang perdagangan dan menjadi salah satu penggerak ekonomi Nasional. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki sistem yang fleksibel dan mudah dijangkau oleh siapa saja, inilah yang membuat UMKM sangat cepat mengalami perkembangan pada lapangan pekerjaan. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi cukup strategis terutama secara nasional. Selain itu, UMKM juga memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja dan mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan mempunyai kontribusi terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB) sekitar 57% menurut Bank Indonesia (dalam Prajanto dan Setiana, 2018).

Dasar tujuan utama dari suatu usaha ialah untuk menghasilkan laba dan memuaskan pemilik termasuk pemilik UMKM, namun dalam mencapai tujuan

utama tersebut para pelaku usaha sering mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya (Dermawan dkk, 2020). Seperti yang dipaparkan oleh Muchid (2015) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM terkadang menghadapi berbagai kendala atau masalah seperti: (1) tingkat pendidikan yang rendah, (2) rendahnya pengetahuan teknologi informasi, (3) kurangnya keandalan pencatatan laporan keuangan. Rendahnya pemahaman mengenai laporan keuangan menghambat pelaku UMKM dalam melakukan peminjaman modal. Sulitnya pelaku UMKM untuk memperoleh pinjaman modal dari pihak lembaga keuangan disebabkan oleh kurangnya memenuhi persyaratan karena salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman modal, setidaknya perusahaan harus memiliki sebuah laporan keuangan. Selain itu pelaku UMKM juga mengalami keterbatasan kemampuan dalam bidang akuntansi sehingga hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM masih kesulitan dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Lestari, 2019). Melihat beberapa kendala tersebut, terkadang membuat pelaku usaha kecil menjadi sulit untuk berkompetisi di dunia usaha dan menyebabkan mereka semakin tersingkir dari pesatnya persaingan usaha. Mengingat kendala terbesar yang dialami pelaku UMKM adalah pengelolaan keuangan yang efektif baik untuk menjalankan organisasi maupun untuk kegiatan ekspansi dalam pertimbangan persaingan secara global (Zhang dan Ye, 2010).

Hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM terlalu fokus terhadap kegiatan operasionalnya sehingga proses pencatatan, pelaporan akuntansi dan keuangannya kerap diabaikan (Judianto dkk, 2018). Secara umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah salah satu usaha kekeluargaan yang cenderung masih belum dapat memisahkan administrasi keluarga dengan keuangan perusahaan, hal ini

menyebabkan kesulitan bagi perbankan dalam mengetahui seberapa jauh dan seberapa besar kemampuan membayar UMKM atas kredit yang mereka dapatkan (Purwanti, 2017). Pemisahan administrasi perlu dilakukan untuk melihat kemajuan usaha melalui sebuah laporan keuangan, yang mana pertama dilakukan adalah pemisahan uang milik pribadi dan uang usaha untuk keteraturan karena adanya catatan keuangan yang terpisah akan tercatat secara jelas dan benar, dapat menampilkan perbedaan anatar komponen usaha dan pribadi (Risnarningsih, 2017).

Melihat adanya keterbatasan tersebut, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) membuat peraturan mengenai penyusunan laporan keuangan sederhana yang mudah diaplikasikan oleh Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. SAK EMKM adalah salah satu standar keuangan yang dirancang secara sederhana guna kemudahan untuk diterapkan oleh pelaku UMKM. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) diciptakan guna membantu pelaku UMKM yang baik namun belum memiliki akses permodalan dari pihak perbankan di Indonesia. Penerbitan SAK EMKM akan mempermudah pelaku usaha khususnya UMKM dalam membuat laporan keuangan yang akan memudahkan usahanya untuk memperoleh pinjaman dari perbankan (*Russel Bedford SBR, 2017*). SAK EMKM ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2016 dan efektif diterapkan dari tanggal 1 Januari 2018. Membuat laporan keuangan dan catatan akuntansi sesuai standar akan membantu UMKM dalam mengajukan kredit kepada pihak bank atau lembaga perkreditan (Pramitha dkk, 2017).

SAK EMKM diterbitkan untuk memenuhi tujuan mengenai standarisasi laporan keuangan yang dimiliki oleh UMKM. Menurut SAK EMKM (2016)

sebuah laporan keuangan ditujukan memberi informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas yang memiliki manfaat bagi sejumlah besar dari pengguna keputusan ekonomi guna memenuhi kebutuhan dari informasi tersebut. Disahkannya SAK EMKM diharapkan membantu literasi keuangan bagi UMKM yang ada di Indonesia sehingga pelaku UMKM mudah dalam mengakses permodalan dari pihak perbankan. Kedepannya, diharapkan standar keuangan ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan sebagai pondasi untuk mengembangkan usaha (Rafiq, 2018).

Adanya penerbitan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) UMKM terbaru diharapkan bagi pelaku UMKM agar dapat mengimplementasikan standar keuangan terbaru kedalam catatan laporan keuangannya. Namun kebanyakan UMKM saat ini masih belum menerapkannya pada laporan keuangan sesuai standar keuangan yang diterbitkan. Sesuai dengan penelitian yang digarap oleh Kartika dkk (2021), dengan judul penelitian “Tingkat Pemahaman Dan Kesiapan Pelaku UMKM Di Kota Mataram Dalam Implementasi SAK EMKM”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Dilihat dari tingkat pemahaman pelaku UMKM di Kota Mataram dalam mengimplmentasikan SAK EMKM pada laporan keuangannya ada pada kategori cukup paham. Dapat diartikan bahwa pelaku UMKM yang ada di Kota Mataram memiliki pemahaman yang cukup dalam hal pengukuran, asumsi dasar, dan penyajian laporan keuanga. (2) Dilihat dari tingkat kesiapan pelaku UMKM di Kota Mataram pada implementasi SAK EMKM pada laporan keuangannya terletak pada kategori tidak siap. Catatan transaksi yang dimiliki oleh pelaku

UMKM di Kota Mataram tidak berbasis akrual, tidak adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, dan rendahnya sumber daya manusia yang ahli di bidang akuntansi.

UMKM di Kabupaten Buleleng senantiasa mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hal tersebut dipicu dari berkembangnya Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Perkembangan jumlah UMKM berdasarkan sektor usaha di Kabupaten Buleleng tahun 2017 sebanyak 32.907 unit, tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 34.552 unit, tahun 2019 sebanyak 35.555 unit dan di tahun 2020 mengalami peningkatan pesat sebanyak 54.489 unit (Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2021). Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Gede Indra Dewa Putra mengatakan bahwa, “Meskipun jumlah UMKM meningkat, masih ada tiga tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM yakni persoalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kapasitas permodalan, hingga peningkatan kapasitas produksi serta pemasaran”.

Home Industry Kopi Bubuk “Gunung Luwih” merupakan usaha yang berlokasi di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Usaha ini berdiri sejak tahun 2004 dengan nama Kopi Bubuk “Gunung Luwih” dan omset yang dimiliki sebesar Rp 16.240.000 per tahunnya, sehingga termasuk ke dalam usaha kecil. *Home Industry* Kopi Bubuk “Gunung Luwih” merupakan usaha perorangan yang memproduksi bubuk kopi sebagai produk yang dihasilkan. Produk yang diciptakan sudah mencapai penyebaran hingga ke luar daerah (Pupuan), proses pembuatannya masih menggunakan tenaga manusia untuk memperoleh hasil yang berkualitas. *Home Industry* Kopi Bubuk “Gunung Luwih” menjadi salah satu usaha rumahan yang masih eksis berkembang di tengah persaingan teknologi dan

ekonomi yang semakin pesat. Hal tersebut tidak menjadi kendala bagi pemilik usaha *Home Industry* Kopi Bubuk “Gunung Luwih” untuk terus berkembang dengan terus memproduksi bubuk kopi yang semakin berkualitas. Inilah alasan penggunaan *Home Industry* Kopi Bubuk “Gunung Luwih” sebagai objek penelitian.

Berdasarkan dari observasi awal yang dilakukan, *Home Industry* Kopi Bubuk “Gunung Luwih” terkendala beberapa hal terutama pada pemahaman pencatatan laporan keuangan dan sulitnya akses permodalan, hal ini menyebabkan pemilik usaha kesulitan ketika menghitung permodalan usaha. Mengingat berhubungan tujuan penerbitan SAK EMKM oleh IAI dan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melakukan pinjaman ke pihak perbankan, jadi dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui kesiapan pelaku UMKM terhadap penerbitan SAK EMKM, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, serta konsep entitas bisnis yang diterapkan. Namun, hal pertama yang diperhatikan sebelum menentukan kesiapan pelaku UMKM terhadap implementasi SAK EMKM adalah dari praktik akuntansi yang diterapkan, kemudian analisis kesiapannya, dan terakhir adalah kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM.

Seperti yang dipaparkan oleh Sinarwati (2015) yang menyatakan bahwa, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum diterapkannya pencatatan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng adalah : (1) faktor ketidaksiapan infrastruktur, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketidak disiplin menjadi penyebab sulit diterpkn pada cataatan keuangan berbasis SAK ETAP, (2) faktor kurangnya

pengawasan dari Ditjen Pajak dan Pengawasan dari Bank, (3) faktor ketidakpahaman manfaat dan ketidaktahuan tata cara melaksanakan pencatatan juga menjadi faktor sulitnya penerapan catatan keuangan berbasis SAK ETAP.

Penelitian ini memfokuskan bagaimana praktik akuntansi yang diterapkan, menilai kesiapan UMKM terhadap implementasi SAK EMKM jika dilihat dari pengetahuan mengenai penerbitan SAK EMKM, sarana dan prasarana yang digunakan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan konsep entitas bisnis. Keunikan penelitian ini adalah penambahan *grand theory* yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika dilihat dari perspektif yang berbeda, penggunaan *Grand Theory* pada penelitian kualitatif dimulai dari sumber data untuk mencapai suatu teori, bukan dimulai dari teori untuk menguji sebuah teori. Maka dari itu, penelitian kualitatif yang menggunakan *Grand Theory* memerlukan sebuah prosedur atau dasar penelitian yang tersusun secara baik. Dasar penelitian yang diterapkan pada penelitian ini (penelitian kualitatif) adalah dengan membuat desain penelitian, pengumpulan data, analisis data dan perbandingan hasil penelitian saat ini dengan penelitian yang sudah ada. Berdasarkan pemaparan dan fenomena tersebut, penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Kesiapan Pelaku UMKM Terhadap Implementasi SAK-EMKM *Home Industry* Bubuk Kopi Gunung Luwih, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Home Industry Kopi Bubuk “Gunung Luwih” adalah salah satu UMKM yang terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. *Home Industry* ini sudah berdiri sejak tahun 2004 dan omset yang dimiliki oleh usaha ini

sebesar Rp 16.200.000 pertahunnya, maka dari itu *Home Industry* Kopi Bubuk “Gunung Luwih” termasuk kedalam Usaha Mikro. Berdasarkan dari observasi awal yang pernah dilakukan, *Home Industry* Kopi Bubuk “Gunung Luwih” memiliki beberapa masalah terutama terkait dengan pemahaman terhadap pencatatan laporan keuangan dan sulitnya akses permodalan. Maka dari itu, adanya penciptaan SAK EMKM adalah guna membantu pelaku UMKM dalam membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Mengingat SAK EMKM memiliki tujuan untuk standarisasi laporan keuangan milik UMKM. Maka dari itu, diharapkan pelaku UMKM dapat mengimplementasikan SAK EMKM pada usahanya guna memperoleh manfaat di masa mendatang.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini berfokus terhadap pemilik dan ruang lingkup dari *Home Industry* Kopi Bubuk “Gunung Luwih” pada kesiapan pemilik UMKM terhadap implementasi SAK EMKM.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat yaitu mengenai bagaimana kesiapan pelaku usaha *Home Industry* Kopi Bubuk “Gunung Luwih” dalam mengimplementasikan SAK EMKM?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaku UMKM terhadap implementasi SAK EMKM dalam menunjang pengembangan usahanya agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam akses modal dari perbankan dan untuk memenuhi tujuan dari SAK EMKM itu sendiri.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan yang ada dengan metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Bagi industri rumahan Kopi Bubuk “Gunung Luwih”

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan bahan pertimbangan Bapak Gede Arisubawa (52) selaku pemilik industri rumahan Kopi Bubuk “Gunung Luwih” dalam mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan SAK EMKM agar dapat mempermudah dalam peminjaman modal dan sebagai pemenuhan tujuan SAK EMKM.

c. Bagi UNDIKSHA

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam kepustakaan UNDIKSHA agar nantinya bisa dijadikan pedoman dalam peneliti di masa depan, sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam analisis pencatatan laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan SAK-EMKM.

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya melakukan pencatatan laporan keuangan dan pentingnya mengimplementasikan SAK-EMKM. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi pada perpustakaan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian sebelumnya.

